

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DIDEPAN UMUM TERHADAP AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh:

Sofwan Asfa

NPM: 1621020334

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DIDEPAN UMUM TERHADAP AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu *Syari'ah***

Oleh:

**Sofwan Asfa
NPM: 1621020334**

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Menurut iklim demokrasi, pilihan demonstrasi wajar terjadi untuk menyampaikan aspirasi, karena landasan demokrasi adalah kebebasan, dan juga sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum, dan bukan berarti melaksanakan aksi demonstrasi begitu berjalan dengan lancar, bahwa tak sedikit para aksi demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, bahkan sering berakhir dengan kerusuhan, anarkis atau bentrok dengan aparat keamanan, dari aksi-aksi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum?. 2) Bagaimana batasan dan tata cara pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. 2) Untuk mengetahui batasan dan tata cara pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *hukum normatif*, sifat penelitian *deskriptif analitik*, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, metode pengelolaan data: periksa data (*editing*) dan rekonstruksi, dan metode analisis data menggunakan penelitian komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah; dalam *Fiqh Siyasah* melaksanakan aksi demonstrasi diperbolehkan, dikarenakan merupakan prinsip dari *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai dorongan dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran (keburukan), karena dalam Islam memperjuangkan kebenaran hukumnya wajib, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Depan Umum pun jelas telah diperbolehkan dalam melaksanakan aksi demonstrasi dengan catatan harus mengikuti tata cara menyampaikan pendapat di depan umum yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofwan Asfa
NPM : 1621020334
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Analisis Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi***" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2020
Penulis,



Sofwan Asfa

NPM. 1621020334





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : SOFWAN ASFA
NPM : 1621020334
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : ANALISIS *FIQH* *SIYASAH* DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI DEPAN UMUM
TERHADAP AKSI DEMONSTRASI

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

NIP 195707051989031001

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.

NIP 197501292000031001

Ketua Jurusan

Frenki M.Si.

NIP 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI DEPAN UMUM TERHADAP AKSI DEMONSTRASI”**
disusun oleh Sofwan Asfa NPM 1621020334 Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu,
Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., MHI (.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag (.....)

Penguji III : Marwin, SH., MH (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NPM 16210221993031002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٠٤)

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada
kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang
munkar. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung.”

(Q.S. Ali ‘Imran : 104)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta yakni:

1. Ayahanda Abdul Mujib dan Ibunda Zumrotul Khoiriyah yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya, selalu memberikan doa dan kasih sayang serta motivasi selama ini.
2. Kakak-kakak saya tercinta Wildan Kholid, dan Fauzan Zulkarnain, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Teman seperjuangan Siyasah E, yang telah memberikan pengalaman dan banyak kenangan, serta ilmu-ilmu yang diberikan. Untuk semuanya semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
4. Kelompok 197 KKN Ulubelu yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta yang mengajarkan arti kekompakan dan kebersamaan.
5. Teman-teman khususnya yang selalu ada disamping saya dan selalu ada dalam setiap waktu dan yang tak segan memberikan kritik sekaligus saran selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Sofwan Asfa, Lahir pada tanggal 12 Juni 1998 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Mujib dan Ibu Zumrotul Khoiriyah. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari:

1. Taman Kanak-Kanak Kartini, Desa Bendosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2003-2005.
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2005-2011.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2011-2014.
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah, tahun 2014-2016.
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 30 Oktober 2020
Yang membuat,

Sofwan Asfa
1621020334

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, iman, Islam, dan amal, serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi” dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, dalam kehidupan, dan kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya. Aamiin.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

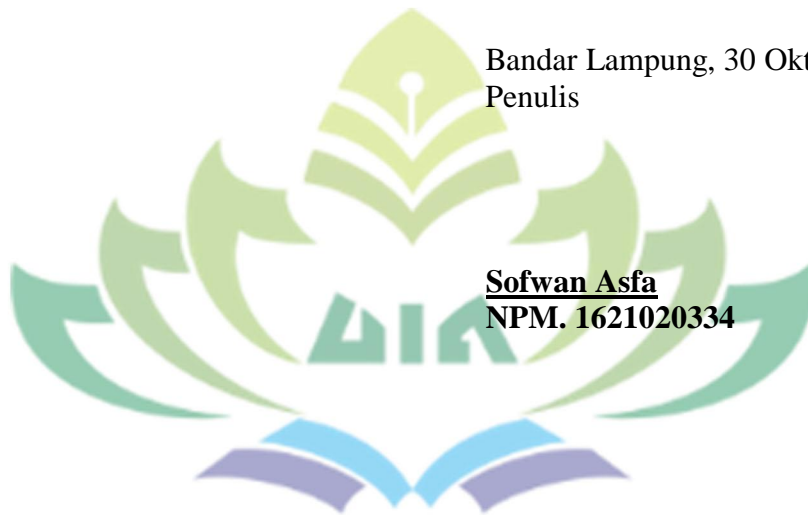
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. dan bapak Marwin, S.H., M.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangsih pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Ayahanda Abdul Mujib dan Ibunda Zumrotul Khoiriyah serta kedua kakak tersayang Wildan Kholid, dan Fauzan Zulkarnain, yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah serta perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku-buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi ilmu selama menempuh pendidikan.

Semoga Allah SWT, memberi balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2020
Penulis

Sofwan Asfa
NPM. 1621020334



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul	3
C. Latar belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Demontrasi dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	15
a. Demonstrasi dalam Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i>	15
b. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	19
c. Demonstrasi Dalam Pandangan Para Ulama	26
d. Dalil-Dalil Tentang Demonstrasi	31
2. Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum	38
a. Demonstrasi dalam Pandangan Hukum Positif	38
b. Sejarah Praktik Demonstrasi di Dunia	41
c. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum	45
B. Tinjauan Pustaka	47

BAB III DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN

A. Macam-Macam dan Waktu Pelaksanaan Demonstrasi di Indonesia	51
B. Jenis Permasalahan yang Menyebabkan Terjadinya Demonstrasi di Indonesia	53
C. Akibat Pelaksanaan Aksi Demostrasi	55
D. Penanganan Aparat Pemerintah Terhadap Gerakan Aksi Demonstrasi dengan Kekerasan	57
E. Demonstrasi yang dilakukan Pelajar (anak-anak)	60
F. Demonstrasi di Fasilitas Vital Negara	64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terkait Pelaksanaan Aksi Demonstrasi Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum	68
B. Analisis Terkait Pelaksanaan Aksi Demonstrasi Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum berdasarkan Hukum Positifnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	83
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dari skripsi ini yakni ialah “**Analisis *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi**”. Untuk mengetahui makna dari penulisan judul tersebut, dan memfokuskan pemahaman kita agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjabaran dan beberapa penjelasan permasalahan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berdasarkan teori dan beberapa sumber literatur yang dapat di pertanggungjawabkan.

Beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini dan penulis rasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

Analisis ialah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Kupasan mengenai suatu soal.¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penyelidikan terhadap suatu kejadian untuk dapat mengetahui sebab akibat dalam keadaan yang sebenarnya.²

Fiqh Siyasah ialah merupakan salah satu aspek Hukum Islam (*Syariat*) yang membicarakan tentang persoalan pengaturan dan pengurusan kehidupan

¹ Rudi Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 8.

² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). h.18.

manusia dalam menjalankan bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³

Undanag-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Depan Umum adalah dasar hukum adanya peraturan mengenai “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum”, dengan Nomor 9 yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 26 Oktober 1998 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 yang terdiri dari 7 bab dan 20 pasal.⁴ Maka dalam penulisan skripsi ini kata-kata “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum”, di persingkat dengan kata-kata “Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat”.

Demonstrasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah pernyataan protes yang dikemukakan secara masal; Unjuk rasa di depan umum.⁵ Adapun pengertian demonstrasi dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat terdapat dalam bab 1, pasal 1, poin ke 3, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di depan umum.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah yang telah dijabarkan di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum**

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada media Group, 2014), h. 4.

⁴ Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum” (on-line), tersedia di: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98_tth_kemerdekaan_menyampaikan_pendapat_dimuka_um.pdf.htm (16Oktober 2019).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. IV, h. 310.

Terhadap Aksi Demonstrasi” tersebut adalah penguraian atau pemahaman arti keseluruhan suatu pokok atas peristiwa menurut *Fiqh Siyasah* terkait ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber Alquran dan Sunnah, baik ketetapan secara langsung ataupun tidak langsung, dan Hukum Positif yang berhubungan dengan adanya praktik pelaksanaan aksi demonstrasi atau unjuk rasa dalam hubungannya dengan kemerdekaan berpendapat di depan umum.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Untuk kajian dalam meninjau yang dimaksud demonstrasi dalam pandangan *fiqh Siyasah* dan dalam negara yang menganut sistem demokrasi untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan di depan umum dalam membangun suatu negara yang majemuk, terlebih lagi dengan negara yang menggunakan kedaulatan rakyat,
- b. Untuk menambah informasi kepada seluruh masyarakat yakni mengenai “Analisis *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum Terhadap Aksi Demonstrasi”.

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang demonstrasi dalam pandangan *Fiqh Siyasah* dan berdasarkan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk menyelesaikan skripsi ini.

- c. Pokok bahasan judul ini sangat relevan dan berkaitan erat dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah pilihan sebagai sistem politik di Indonesia yang sudah ditentukan pada masa kemerdekaan dan sampai saat ini demokrasi masih dijadikan sebagai satu-satunya sistem yang dipilih oleh pemerintahan Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan dari masa ke masa sampai masa saat ini yaitu masa reformasi yang mempunyai versinya masing-masing. Ketika pada masa pemerintahan orde baru, belum berjalan dengan baik, seperti halnya menyampaikan pendapat di depan umum dan kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu.

Pasca berakhirnya pemerintahan orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan dan kemajuan, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Dalam era reformasi jauh lebih baik daripada masa sebelumnya. Akan tetapi problematikanya adalah lebih banyaknya ormas-ormas, LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), organisasi-organisasi yang lainnya menggunakan kebebasan menyatakan pendapat ini dengan jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat mereka untuk mengkritik kinerja pemerintah.⁶

⁶Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. IV, h. 134.

Hukum Positif yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁷ Dengan berjalannya waktu maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Depan Umum, dengan batasan tata cara implementasi berdemonstrasi. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 5 dan 6 tentang hak dan kewajiban berdemonstrasi,⁸ yang berbunyi, “Warga negara yang menyampaikan pendapat di depan umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas; memperoleh perlindungan hukum. (Pasal 5)”, dan Pasal 6 berbunyi, “Warga negara yang menyampaikan pendapat di depan umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (b) Menghormati aturan-aturan yang diakui umum, (c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, (e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”⁹

Menurut iklim demokrasi, pilihan demonstrasi wajar terjadi untuk menyampaikan aspirasi, karena landasan demokrasi adalah kebebasan. Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of*

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah konstitusi Republik indonesia, 2003).

⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 5 dan 6

speech), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.¹⁰

Kita telah mengetahui Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, bahwa tak sedikit para aksi demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, bahkan sering berakhir dengan kerusuhan, anarkis atau bentrok dengan aparat keamanan. Aksi-aksi tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga agama.¹¹

Aksi demonstrasi bisa menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai alat penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Akan tetapi bukan berarti aksi demonstrasi merupakan jalan yang paling baik lebih-lebih ketika aksi demonstrasi tersebut dipakai sebagai alat politik atau ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan individu maupun kelompok kemudian memprovokasi massa, mendorong tindakan anarkis, menebar fitnah serta permusuhan, serta merendahkan wibawa pemerintah dimata rakyat, dan lain sebagainya. Fenomena aksi demonstrasi yang sering terjadi berakhir dengan perbuatan anarkis, mengganggu ketertiban umum, dan tanpa solusi, ternyata telah memunculkan sikap skeptis terhadap gerakan massa. Misalnya seperti aksi penolakan kenaikan harga BBM pada tanggal 20 Juni 2013,

¹⁰Dasar -Dasar Ilmu Politik, *ibid*.

¹¹Said Aqiel Sirajd, *Islam, Demonstrasi dan negara*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/01/opini/1325143.htm>, (18 Oktober 2019).

aksi demonstrasi mahasiswa menentang RKUHP di gedung DPR RI pada tanggal 30 September 2019.¹²

Menurut wacana Islam dalam *Fiqh Siyasah*, demonstrasi disebut *muzhaharah*, yaitu sebuah media sarana menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan massa. Demonstrasi adalah sebuah sarana atau alat yang terkait dengan tujuan digunakan sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misal penggunaan pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.¹³

Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan.¹⁴ Menurut Imam Ghazali, menyampaikan pendapat, kritik, dan memberikan nasihat kepada orang yang keliru adalah wajib. Oleh karena itu, masyarakat harus menegakkan kewajiban ini, bukan untuk tujuan lain, melainkan agar kebenaran itu terus hidup dan eksis. Karena kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup didunia.¹⁵

Islam memperbolehkan melakukan aksi demonstrasi apabila pemimpin atau pemerintah telah melakukan penyelewengan terhadap keadilan, kemakmuran

¹²<http://m.detik.com/news/berita/d-4728216/5-fakta-hari-ini-di-jakarta-yang-berakhir-ricuh.htm>. (20 Oktober 2019).

¹³Ahmad Sarwat, *Fiqh Politik*, (Jakarta: DU CENTER) cet Ke-4, h. 77.

¹⁴Abu A'la Almaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, penerjemah Bambang Iriana Djajatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 30.

¹⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 95.

kepada masyarakat. Tetapi apabila aksi demonstrasi itu dilakukan hanya sebatas segelintir permasalahan maka Islam melarang, karena hal tersebut termasuk bentuk pelanggaran terhadap pemerintah jenis pemberontakan. Dan apabila aksi demonstrasi tersebut sampai menghasilkan keributan, konflik baku hantam antara rakyat dengan aparaturnya sangat dilarang dalam Islam, seperti halnya yang terjadi di Indonesia, tidak sedikit apabila terjadi aksi massa melakukan demo dengan berakirnya keributan.

Islam telah menjelaskan bahwa kita harus taat terhadap pemerintah, sebagaimana ayat tersebut, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النِّسَاء : ٥٩)

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa, Ayat 59).¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dimaksud dalam taat kepada pemimpin di sini apabila pemimpin itu tidak melakukan kezhaliman atas melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin. Maka dalam Hukum Islam yang mana dalam melaksanakannya harus melihat terlebih dahulu aspek positif dan negatifnya. Maka dalam hal ini perlu kepastian dan batasan hukum terkait dengan melaksanakan kegiatan demonstrasi baik di Indonesia maupun menurut Hukum Islam dan pendapat para ulama maupun para ahli terhadap demonstrasi dengan hubungannya terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.

¹⁶ Alquran, *Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (AT-TAYYIB: Cipta Bagus Segara).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang “Analisis *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat”. Dan penulis ingin meneliti lebih jauh lagi terkait dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan umum yang diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998, dan pendapat para ulama dan *Fiqh Siyasah* terkait dengan demonstrasi.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan aksi demonstrasi dalam Hukum Positif dan bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terkait dengan aksi demonstrasi.

E. Rumusan Masalah

Dasar dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum?
2. Bagaimana batasan dan tata cara pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.
2. Untuk mengetahui batasan tata cara implementasi aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

G. Signifikansi Penelitian

Kegunaan yang dapat disajikan dari skripsi ini antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
 - b. Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai politik, terlebih lagi yang berkaitan dengan hal politik Islam diarah akademik perguruan tinggi dan untuk menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
 - c. Diharapkan penelitian ini mampu memperkaya wawasan tentang kebebasan berpendapat di depan umum untuk masyarakat luas khususnya umat Islam dengan alasan agar mereka dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁷

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode penelitian yang mampu mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka perlu menentukan cara atau metode yang dianggap paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum *normatif*, yaitu penelitian yang memahami dan mengkaji penerapan adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.¹⁸ Jenis hukum normatif ini berupa menemukan

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet: ke-23, h. 2-3.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), cet Ke-14, h. 14.

kesamaan dan kesesuaian antara muatan isi Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dengan Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik*, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum terhadap aksi demonstrasi dari data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian dianalisa dengan Fiqh Siyasah.

3. Sumber Data

Penelitian untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut didapatkan dengan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Untuk memperjelas sumber data yang digunakan maka akan diuraikan sebagaimana berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum tersebut memiliki sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Diantaranya yaitu penelitian studi pustaka yang menjelaskan isi terkait analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yang Terkait Dengan Aksi Demonstrasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang berisi suatu informasi serta penjelasan pendukung yang mengiringi data primer. Seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertai jurnal-jurnal hukum, termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.¹⁹

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang berisikan informasi tentang penjelasan data baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus-kamus, ensiklopedia baik media cetak atau media online.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Pelaksanaan metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, menelusuri, menulis, menganalisa, mengkaji data yang berkaitan dengan suatu hal variabel yang dapat berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, artikel yang bersifat bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan isi dari penelitian tersebut.

5. Metode Pengolahan Data

Secara umum teknik pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Periksa data (*editing*) ialah memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

¹⁹Peter mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 141.

- b. Rekontruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

6. Analisis data

Guna tercapainya tujuan yang dimaksud, analisis data tersebut menggunakan metode penelitian komparatif yaitu membandingkan antara persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran yang melatar belakangi adanya praktik aksi demonstrasi berdasarkan *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Demonstrasi dalam *Fiqh Siyasah*

a. Demonstrasi dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*

Demonstrasi merupakan salah satu unsur dari alat komunikasi dalam menyalurkan partisipasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak setujunya dengan kebijakan atasan suatu lembaga, organisasi, instansi sampai ke pemerintah. Bentuk demonstrasi ini biasanya berupa setuju atau tidak setujunya suatu kinerja hingga sampai kritikan terhadap suatu kinerja kebijakan pemerintah yang mana menyulitkan atau merugikan beberapa pihak terkait seperti halnya karyawan, ormas, bahkan hingga sampai seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah merupakan ciri dari makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai *barometer* kemanusiaan manusia.²⁰ Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seseorang atau lebih dari seorang dengan tujuan mengeluarkan pendapat

²⁰Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 194.

atau ide pikiran dengan menggunakan lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.

Pengertian demonstrasi atau disebut juga dengan unjuk rasa, dalam hukum Islam belum dijelaskan secara pasti, baik dalam Alquran maupun As-Sunnah, namun dalam kenyataan yang ada dan yang terjadi, yang diperintahkan kepada kita adalah menyampaikan kebenaran sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib. Yang mana terdapat dalam Alquran surat As-Shaff ayat 9 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ (الصَّافَّ : ٩)

Artinya: “Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk-Nya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci”(Q.S. As-Shaff ayat 9).²¹

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Dari ayat Alquran ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Dalam Islam memperjuangkan kebenaran hukumnya wajib.

Menurut wacana Islam dalam *Fiqh Siyasah*, kata demonstrasi dalam bahasa Arab yaitu *muzhaharah* dan *masirah*, sedangkan kata *muzhaharah* memiliki arti demonstrasi dalam *terminologi* kaum sosialis

²¹ Alquran, *Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (AT-TAYYIB: Cipta Bagus Segara).

yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan cara boikot, pemogokan, kerusuhan dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *muzhaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat umum menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas pemerintah atau tanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebut bahwa aksi *muzhaharah* tersebut biasanya diwarnai aksi kekerasan dan anarkis.²²

Sedangkan kata *masirah* menurut harfiah adalah “perjalanan”. Yang dimaksud dengan kata *masirah* adalah lawan dari kata *muzhaharah* yaitu aksi demonstrasi yang tidak disertakan oleh aksi anarkis atau kerusakan, dan bisa disebut juga *long-march* yakni lebih menekan pada pola aksi yang bergerak atau berjalan dengan damai yang tidak hanya diam di suatu tempat tertentu (pawai). Pola seperti ini disebut dengan pola dinamis, sebagai lawan dari pola statis, yaitu aksi yang dilakukan hanya berdiam di suatu tempat tertentu, misal seperti aksi mimbar bebas.²³ Apabila keadaan yang memungkinkan unjuk rasa, boleh dilakukan oleh setiap Muslim dengan memperhatikan adab dan akhlak dalam menyampaikan pendapat di depan umum dan menarik dukungan publik.

Demonstrasi bisa diartikan sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk bermaksud mencapai tujuan yang diinginkan, dan

²² Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli Desember 2014) hal. 356 (13 Juli 2020).

²³ *Ibid.* h. 357

bagaimana cara menggunakannya sarana atau alat tersebut, seperti halnya perumpamaan pisau, yang dapat dipergunakan untuk kebaikan (jihad), dan bisa pula digunakan untuk berbuat kejahatan (maksiat).²⁴ Nabi Muhammad SAW, juga pernah bersabda mengenai pentingnya menasehati pemimpin yang zalim, hingga perbuatannya dihukumi jihad, seperti halnya dalam hadis tersebut :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ بْنِ الْجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya: Dari Abu Abdillah, yaitu Thariq ibn Syihab Al-Ahmasi R.A. Bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ia meletakkan kakinya pada sanggur tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu, berkata: "Manakah jihad yang paling utama?" Rasulullah SAW, pun menjawab: "Yaitu mengucapkan kata-kata yang hak dihadapan sultan yang menyeleweng." (Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih).²⁵

Definisi dari hadis tersebut menunjukkan bahwa memiliki dua makna dari istilah demonstrasi yakni : (1) menunjukkan keahlian atau kemampuan bagaimana cara menerapkan suatu hal, ataupun (2) mendukung atau menentang suatu usulan dalam suatu kebijakan ditempat umum, baik dalam sebuah perusahaan, institusi, hingga pemerintahan suatu negara.

²⁴ Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat* (Gorontalo: Jurnal) hal. 335.

²⁵ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin*, (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/1264 M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 84

Pada dasarnya segala macam *masirah* atau demonstrasi yang diniatkan karena Allah SWT, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam adalah salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. *Masirah* atau demonstrasi seperti ini memiliki niat urgensi besar dalam menampakkan kekuatan kaum muslimin. *Masirah* untuk membela penderitaan umat Islam itu lebih spesifik lagi, karena memperlihatkan solidaritas *ukhuwah* kaum muslimin terhadap saudara-saudara mereka yang dizalimi.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan aksi atau tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk menyatakan pendapat di depan umum, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu kebijakan baik dengan cara membawa poster, tulisan, dan sebagainya. Namun menurut terminologi dalam bahasa Arab sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara *muzhaharah* dan *masirah*, *muzhaharah* merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, adapun *masirah* lebih kepada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan *long march*.

b. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam *Fiqh Siyasah*

Menurut sejarah dalam Islam demonstrasi tidak ditemui dalam masa Rasulullah SAW, namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan ditengah umat Islam, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut,

namun wahyu Allah tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut semakin genting. Kemudian Rasulullah SAW, berijtihad berlandaskan Alquran.²⁶

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat di depan umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang mana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi dalam menentukan pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sehingga terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni *Muhajirin* dan *Anshar* sebagai pengganti Rasulullah dalam melanjutkan kepemimpinannya. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.²⁷

Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar ibn Khatab R.A. dan pemerintahan beliau berlangsung selama sepuluh tahun (15-24H/634-644M).beliau merupakan khalifah yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak terjadinya aksi demonstrasi, dikarenakan dalam kepemimpinannya beliau sangatlah tegas dan tidak lupa dalam kebijakannya selalu mengingat

²⁶ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), h. 41.

²⁷ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 35.

kewajibannya sebagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya. Dengan ketegasan dalam kepemimpinannya ada juga yang iri dari beliau. Sehingga beliau meregang nyawa oleh tawanannya sendiri.

Hal tersebut terjadi karena penetapan peraturan jizyah atau pajak yang terlalu besar yang ditetapkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah (gubernur Kufah) kepada seluruh tawanannya. Salah satu dari tawanannya mengajukan keberatan atas peraturan pajak tersebut kepada khalifah, namun pengajuan tersebut ditolak oleh sang khalifah. Sosok tawanan tersebut merupakan salah satu tawanan yang mulai beranjak dewasa yang diajak menemani khalifah dikarenakan dia memiliki keahlian dalam berperang, yang dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Demikian itu Abu Lu'lu'ah melakukan pemberontakan kepada khalifah Umar dengan cara menikam khalifah dengan pedang bermata dua dihari yang berbeda pada waktu subuh. Setelah peristiwa tersebut, terbunuhnya Umar mulai tampak dengan adanya penyampaian pendapat yang berujung dengan cara anarkis.

Masa pemerintahan Utsman bin Affan R.A. berlangsung selama 12 tahun. Pada pemerintahan beliau banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi dari kalangan rakyat pada saat itu karena kebijakan-kebijakan Utsman dinilai banyak kontroversial. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, adanya pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat tidak setuju atas kebijakannya, Sehingga banyak yang mengkritik dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan

Utsman dari kekhalifahannya. Sosok yang dianggap paling penting yakni adalah Marwan ibn Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendalikan kekuasaan, dan Utsman hanya berstatus khalifah.²⁸

Selanjutnya adanya harta kekayaan negara oleh kerabatnya yang dibagi-bagi dan hal tersebut tidak diketahui oleh Utsman R.A. Ketidak tegasan Utsman R.A. terhadap kesalahan bawahannya dalam melaksanakan tugas, memunculkan kebencian umat Islam terhadapnya. Sebagai ahli sejarah menilai, bahwa Utsman melakukan nepotisme. Ia mengangkat sanak saudaranya dalam jabatan-jabatan strategis yang paling besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah-kabilah merasakan pahitnya tindakan Utsman tersebut.²⁹

Pada puncak kekecewaan tersebut menimbulkan kekerasan fisik dan berbuah pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang yang kecewa tersebut hingga tega membunuh sang Khalifah Utsman R.A. Pada masa ini praktik demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pemberontakan mulai memuncak pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan pasca terbunuhnya Umar ibn Khatab R.A. Bila kita melihat hal tersebut bukan hal mutlak kesalahan Utsman R.A. dikarenakan beliau di pilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun melalui pilihan yang ditunjuk Umar ibn Khatab R.A. dari enam kandidat yakni diantaranya adalah Utsman, Ali, Thalbah, Zubair, Saad ibn Abi Waqqash, dan Abdurrahman ibn Auf.

²⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, *ibid*, h. 36.

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, *ibid*, h. 38.

sehingga pada usia lanjut tersebut dimanfaatkan oleh keluarganya yang menginginkan jabatan dan kekuasaan.

Pasca terbunuhnya Utsman bin Affan R.A. dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang berlangsung selama 6 tahun. Beliau diangkat berdasarkan baiat yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai. Pada masa pemerintahannya selalu terjadi pergolakan sehingga tidak dapat dikatakan stabil. Salah satu kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib tersebut yakni, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan yang diyakini keteledoran, merekalah yang mengakibatkan pemberontakan dalam kekhalifahan. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada masyarakat dengan cara menyerahkan hasil dari pendapatannya kepada negara, serta kemudian kembali menggunakan sistem distribusi pajak yang sebelumnya pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khatab. Setelah Ali bin Abi Thalib R.A. merubah kebijakan tersebut, tidak lama kemudian beliau menghadapi pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A.

Hal tersebut terjadi setelah penyampaian pendapat dan melakukan aksi bela berupa tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. untuk segera diadili, namun Ali pun menolak untuk menghukum seseorang yang diduga kuat telah membunuh Utsman bin Affan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun sebenarnya menginginkan sebuah sikap untuk menghindari peperangan, bahkan

beliau sempat mengirimkan surat terhadap Zubair dan Thalhah untuk bermusyawarah dan mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai. Namun upaya tersebut ditolak sehingga akhirnya pertempuran besarpun terjadi hingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “Perang Jamal (Perang Unta)” dikarenakan sang istri Rasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar R.A. berhasil mengalahkan lawannya dengan menunggangi unta. Zubair dan Thalhah terbunuh saat ingin mencoba melarikan diri, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar R.A. pun ditangkap yang kemudian untuk dipulangkan kembali ke Madinah. Kemudian meredamlah aksi pembelaan yang berujung pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal tersebut.

Setelah masa meredamnya pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal, demonstrasi atau unjuk rasa dalam pergolakan pemerintahan banyak bermunculan. Setelah Ali meredam pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tersebut, kemudian bergeraklah pasukan Ali dari wilayah Kuffah menuju ke wilayah Damaskus dengan jumlah tentara yang cukup banyak, yang kemudian saling bertemu di wilayah Shiffin, sehingga perang tersebut dikenal dengan istilah perang "Shiffin". Peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara tahkim (arbitrase) yang tidak membuahkan hasil dalam mengakhiri konflik. Hal tersebut bukan menyelesaikan namun justru malah memunculkan masalah baru yakni adanya golongan ketiga dalam politik, yakni orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib atau lebih

dikenal dengan istilah al-Khawarij. sehingga tepat pada tanggal 20 Ramadhan 40H/660M, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu yang diduga berasal dari Khawarij.³⁰

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik unjuk rasa dalam Islam, bahwasanya unjuk rasa atau menyampaikan pendapat sudah mulai nampak setelah wafatnya Rasulullah SAW, tetapi saat Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Di masa pertengahan ke Khalifahan Umar ibn Khatab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman bin Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan. Di masa ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi. Aksi tersebut dipimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Namun yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan. Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib), Mu'awiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga masa Islam modern sekarang.

Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu. Era moderen pasca wafatnya Rasulullah SAW,

³⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, *ibid*, h. 40.

dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

c. Demonstrasi Dalam pandangan Para Ulama

Menurut perspektif Islam, kata demonstrasi memang tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran. Namun dalam Islam kata demonstrasi atau unjuk rasa memiliki dua pengertian yang berbeda sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau pelaksanaannya. Dua pengertian tersebut yakni *muzhaharah* adalah demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan *masirah* adalah demonstrasi atau unjuk rasa yang boleh dilakukan dalam Islam. Akan tetapi prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.³¹ Kata *amar ma'ruf nahi munkar* dalam istilah fiqh biasa disebut dengan istilah "*Al-Hisbah*" dengan demikian secara sederhana maksud istilah "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang telah meng-Indonesia tersebut adalah menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran.³² Allah SWT, berfirman :

³¹Muhammad Aminullah, *ibid*, h. 360.

³²Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialaog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), cet II, h. 36.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ (آل عمران : ١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran, ayat: 104).³³

Meskipun pelaksanaan aksi demonstrasi bermula dengan damai, namun hal tersebut dapat berbalik arah yang dapat menimbulkan kericuhan, akibat adanya pencelaan terhadap pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Mereka akan melakukan berbagai cara agar suara mereka terdengar oleh pemerintah. Meskipun bermula tidak menggunakan senjata tajam, dan dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun hal tersebut dapat menimbulkan sikap tidak terima pemerintah terhadap para aksi demonstran tersebut sehingga dilakukan pengamanan oleh petugas dan berujung penyerangan oleh demonstran. Berdasarkan realita yang dijumpai dilapangan, Abdullah bin 'Ukaim menyatakan bahwa “menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya”.³⁴

Permasalahan dalam suatu peristiwa demonstrasi, diperlukan adanya pendapat yang telah diteliti dan dikeluarkan oleh ulama yang menguasai permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini penulis memilih

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), h. 337

³⁴ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h.47.

Yusuf Al-Qardhawi selaku salah satu tokoh ulama kontemporer dalam memberikan pendapat mengenai konflik yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, dalam suatu *ikhtilaf* (perselisihan) terhadap beberapa macam-macam dan sebab-sebabnya. Macam-macam *ikhtilaf* disebabkan oleh dua faktor yakni diantaranya:

Pertama faktor ahlak, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti halnya membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap pemimpin maupun negerinya sendiri. Beberapa faktor tersebut merupakan ahlak tercela dan merupakan kategori ahlak yang mencelakakan atau *muhlikat*. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang tidak terpuji, bahkan termasuk kategori perpecahan yang buruk.

Kedua faktor pemikiran, perselisihan ini muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh paling nyata yakni diantaranya adalah adanya suatu perbedaan jamaah-jamaah Islam terhadap sikap politik pada masa sekarang. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata, yakni adanya keterkaitan dalam suatu pertimbangan antara mudharat dan manfaat. Adapun sebagian

perselisihan yang lainnya hanya bersifat fiqh murni, yaitu dikembalikan lagi terhadap perbedaan pandangan mengenai hukum syara' terkait adanya permasalahan tersebut.³⁵

Yusuf Al-Qardhawi memberikan pendapat mengenai demonstrasi yakni, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan dalam Islam selama memiliki tujuan yang baik serta di dalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan *“adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi”. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian*”. Dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi tersebut memiliki kaidah hukum Islam, yakni

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاجَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal dari semua hal itu adalah boleh (kecuali ada nash yang menyatakan tidak bolehnya)”, di mana mempertimbangkan kaidah pokok fiqhiyyah yang dipastikan tidak keluar **مقاصد الشريعة** (*tujuan syar'iyah*)

yaitu; mewujudkan dan memelihara kemaslahatan, dan tidak pula lari dari misi umum dan strategi dasar yang terkenal dikalangan para ahli ushul dan fuqaha yaitu; perintah kebaikan, mencegah kemungkaran,

³⁵Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, (Jakarta: Robbani Press, 1991), cet 1, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid, h. 19.

menolak bencana, menghilangkan kesulitan, meringankan beban, bertahap dalam penetapan.³⁶

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qadharawi, beberapa para ulama Wahabi Salafi berpendapat bahwa hukum demonstrasi tersebut diharamkan. Ulama yang berpendapat bahwa demonstrasi ini haram ialah Syaikh Abdul ibn Aziz, Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, murid-murid Syaikh Al-Albani, hingga fatwa-fatwa (Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Abdullah Al-Ghudayan, Shalih Al-Fauzan, Bakr Abu Zaid). Dari beberapa fatwa ulama wahabi salafi tersebut, hampir memiliki pendapat yakni tidak membolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin yakni dengan pedoman Alquran dan Al-Hadis. Saran tersebut yakni diantaranya adalah dengan menggunakan media tulis, berkomunikasi secara langsung atau dengan menggunakan via telephone, atau dapat dilakukan dengan cara syara' yang lain, saran tersebut disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz ibn Baz.³⁷

Perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum merupakan perbedaan yang bukan permasalahan pokok, adapun hanya persoalan permasalahan cabang, dan tidak ada hubungannya dengan

³⁶Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), cet.1, h. 137.

³⁷Abu Ubaidah Yusuf, *ibid*, h. 55.

permasalahan yang bersifatnya wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan. Pada umumnya para ulama mengutamakan perkara yang wajib, yakni tentang maslahat untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunah yang dapat merusak perkara yang wajib. Dalam hal ini diperlukan ahlak yang baik didalam suatu pergaulan antara umat muslim.³⁸

d. Dalil-Dalil Tentang Demonstrasi

Penjelasan tentang demonstrasi atau unjuk rasa telah disebutkan di atas, bahwa terdapat dua pengertian demonstrasi dalam Islam, *muzhaharah* adalah demonstrasi yang dilarang dan *masirah* adalah demonstrasi yang diperbolehkan atau dianjurkan. Yang membedakan keduanya adalah tindakan-tindakan para demonstran ketika menyampaikan aspirasi dan juga bentuk tuntutan atau protes itu sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam

³⁸ Abdul Majid Khon, *ibid*, h. 168.

Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.³⁹ Allah berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَالْآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ (الأنفال : ٦٠)

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dalam persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah SWT, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah SWT, mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah SWT, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)” (Q.S. Al-Anfaal, ayat 60).⁴⁰

Dalam ayat ini jika unjuk rasa atau demonstrasi jika niat dari demonstrasi itu benar serta jelas mengarah kebenaran, maka janganlah takut maupun

³⁹ Demonstrasi dalam Perspektif Hadits. *Ibid*, h. 360-361.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), h. 147

gentar dalam menghadapi musuh-musuh Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT, Maha Mengetahui dan akan menolong hamba-Nya.

Dalam pembahasan soal kebebasan berpendapat, Wahbah az-Zuhailly melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu menyangkut pemerintah. Maka tatkala Umar berpidato, “Rakyatku, siapa aja yang melihat ada yang bengkok pada diri saya, hendaknya dia meluruskannya”, seorang A’raby (orang Arab pedalaman) menimpali, “Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau saja aku dapatkan ada yang bengkok pada dirimu, aku akan meluruskannya dengan pedangku ini.” Menanggapi orang ini, Sayyidina Umar berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan, ada diantara umat ini, orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar dengan pedangnya.”⁴¹

Inilah beberapa prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah menurut Islam. Selama pemerintah masih menerapkan batas-batas ini, rakyat dituntut untuk *Sam’an wa Tha’atan* terhadap pemerintah. Karena ada dua hak pemerintah ketika pemerintahannya dipandang absah, yaitu ditaati oleh rakyat dan mendapat dukungan rakyat dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Tetapi jika pemerintah sudah

⁴¹ Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M) juz VI, h.712-122

menyimpang dari garis-garis ini, rakyat punya hak untuk mengontrol, mengoreksi dan bahkan protes kepada pemerintah.⁴²

Ada beberapa hadis yang mendukung, semisal hadis yang diriwayatkan Abu Dawud;

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).⁴³

Jika kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengingatkan dan mencegahnya, maka akan berdampak pada rakyat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan Muhammad Abduh dalam tafsirnya, bahwa perilaku dalam mengabaikan kewajibannya akan berdampak pada umat secara keseluruhan, tidak hanya pada individu yang bersangkutan. Perlu diperhatikan, bahwa setiap umat yang melenceng dari jalan yang lurus dan tidak memperhatikan dan menjaga sunnah yang digariskan Allah terkait makhluk-Nya, maka hukuman Allah akan menimpa mereka, berupa kefakiran, kehinaan, serta runtuhnya keagungan dan kekuasaan.

Hadis dan pendapat tersebut mengisyaratkan kepada rakyat untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu rakyat diberikan kewenangan

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M) juz VI, h.725.

⁴³ Abu Dawud Sulaiman bin Ats'as as-Sajastani, *Sunan abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), Jus III, h. 128

untuk menyampaikan kebenaran yang seharusnya dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Upaya untuk meluruskan kesalahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara *amr ma'ruf nahi munkar* yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu dengan memberikan koreksi dan masukan berupa teguran dan nasehat secara lisan. Jika penguasa atau pemerintah menyimpang dari aturan Islam atau melakukan tindakan yang melenceng dan merugikan rakyat, maka kewajiban semua orang, baik individu atau kelompok, untuk memberikan nasehat.⁴⁴

Lebih jauh lagi, Abdur Qadir Audah, dalam *al-Tasyri' al-jina'i Al-Islami* bahkan memperbolehkan rakyat untuk mendongkel penguasa yang menyeleweng dan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Tulis beliau: “Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau keluar dari batas-batas prinsip, dia tidak berhak didengar dan ditaati. Bahkan, dia harus mengundurkan diri, untuk (kedudukannya) diberikan kepada yang lebih berkhlayak dan mampu memerintah sesuai aturan yang Allah SWT, tetapkan. Jika dia tidak mau mundur diri secara sukarela, rakyat berhak memaksanya dan mencari penggantinya secara bebas.”

Tetapi jika melihat realitas yang terjadi dewasa ini, kehidupan kebangsaan kita, banyak diwarnai oleh kecurigaan, saling meng-kambinghitamkan, *su'uddzan* dan seterusnya. Ini menimbulkan iklim yang tidak sehat. Pemerintah menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan

⁴⁴ Musthafa Mahmud “*Thahan, Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana*,” (terj. Akmal Burhanuddin, Bandung: Penerbit Harakatuna, 2007), h. 260.

pemerintah. Dan kondisi seperti inilah yang disinyalir oleh hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal :“Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian doakan dan mendoakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah yang kalian benci dan benci kalian, kalian maki dan memaki kalian”.⁴⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menasehati penguasa atau mengkritik kebijakan penguasa yang dzalim, hukumnya wajib, hanya saja caranya bisa beragam, bisa dilakukan langsung, dengan bertemu secara *face to face*, atau secara tidak langsung, dengan melalui tulisan dan surat, namun apabila usaha-usaha tersebut tidak membuahkan hasil atau tidak direspon sama sekali maka barulah dilakukan aksi demonstrasi. Dengan harapan, kebenaran yang ingin disampaikan benar-benar bisa direspon dengan baik oleh penguasa (pemerintah). Dalam hal ini, melalui aksi demonstrasi setidaknya rakyat telah berpartisipasi dalam melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa.

Melihat realitas sekarang, khususnya di Indonesia, untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tidak mampu lagi dengan melakukan kritik atau nasehat dengan sembunyi-sembunyi, karena dengan cara tersebut penguasa malah leluasa dengan memberikan solusi-solusi yang hanya menguntungkan orang yang mengkritik atau menasehati. Dalam artian ketika solusi yang akan

⁴⁵ Ahmad bin Hambal abi Abdillah as-Syaibani, Al-Musnad, (Beirut: Dar al-Fikr,1991, juz IX, .No24036), h.256

diberikan tersebut benar-benar mempunyai dampak positif bagi rakyat, namun menimbulkan dampak negatif bagi kekuatan politik penguasa, maka pemberi kritik atau nasehat akan ditawarkan hal-hal yang bisa membungkam si pemberi kritik atau nasehat tersebut agar diam dan terima saja kebijakan yang telah ditentukan, sekalipun kebijakan tersebut tidak mensejahterakan rakyat, misalnya dengan iming-iming harta dan jabatan. Begitu juga dengan demonstrasi, sebenarnya tidak jauh beda dengan metode pertama. Melihat kondisi masyarakat sekarang, demonstrasi yang awalnya merupakan cara yang bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya digunakan sebagai sarana *memback up* kepentingan-kepentingan politik bagi oposisi atau lawan-lawan politik penguasa.

Demonstrasi hari ini telah keluar dari nilai-nilai idealismenya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Para demonstran terkadang tidak sadar dengan apa yang sedang mereka perjuangkan, apakah tuntutan tersebut berdampak positif bagi kepentingan rakyat atau malah sebaliknya hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan elit politik saja. Oleh sebab itu, dalam menyikapi kebijakan-kebijakan penguasa seharusnya kita lebih cermat lagi dalam menyikapinya, apakah mengoreksi, mengkritik ataupun menasehatinya dengan cara tertutup atau dengan cara terbuka, tentunya harus benar-benar memahami maksud dan tujuan yang akan kita sampaikan. Jangan sampai, apa yang ingin kita sampaikan malah menjadi sesuatu yang merugikan dan berdampak

negatif bagi kepentingan rakyat, karena ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan elit politik saja.

2. Demonstrasi Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum

a. Demonstrasi dalam Pandangan Hukum Positif

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata demonstrasi bisa mengandung dua makna, yaitu; (1) demonstrasi ialah pernyataan protes yang dilakukan secara massal, unjuk rasa, yang berbondong-bondong mengadakan menentang percobaan nuklir. (2) demonstrasi ialah peragaan atau pertunjukan tata cara yang melakukan atau mengerjakan sesuatu.⁴⁶ Dan istilah demonstrasi ini juga didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yakni di antaranya: Tayar Yusuf, yang menyatakan bahwa istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto, demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.⁴⁷

Demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan kegiatan aksi yang dilaksanakan oleh beberapa komponen organisasi masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara.

⁴⁶ Frista Artmanda W, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), h. 220

⁴⁷ H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), (14 Juli 2020).

Demonstrasi bukan berarti kekacauan, Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Demonstrasi juga merupakan suatu bentuk kurang adanya posisi tawar dari masyarakat terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis kearah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis.

Demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengeluarkan pendapat agar terpenuhi kepentingannya dan juga merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam kemerdekaan berpendapat dan pada umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menunjukkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat dengan cara berkumpul. Namun sekalipun sudah terdapat peraturannya, ada kalanya juga praktik yang dapat menciderai

demonstrasi itu sendiri. Penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan.

Masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada secara tulisan. Selain dirasa lebih efektif, cara ini dipilih karena masyarakat menganggap bahwa pendapat mereka akan lebih tersalurkan dan akan langsung didengar oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh makhluk hidup yang bernama manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.⁴⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah “sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara di depan umum.” Demonstrasi atau unjuk rasa yang merupakan kegiatan aksi yang dilaksanakan oleh beberapa komponen organisasi masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah.⁴⁹

Aturannya dalam Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Bahkan bukan hanya mengatur tentang dan

⁴⁸ Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, “*Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesia*” Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November 2017, h. 85.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

kewajiban para unjuk rasa tersebut. Akan tetapi, dari Undang-Undang tersebut mengenai peraturan tentang prosedur penyampaian pendapat di depan umum dengan cara jalur demonstrasi, yaitu para demonstrasi wajib melaporkan atau memberitahukan kepada pihak aparat pemerintahan (polri) sebelum aksi demonstrasi dilaksanakan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), isi dari pasal tersebut yaitu, “Penyampaian pendapat di depan umum (dengan cara demonstrasi) wajib diberitahukan secara tertulis kepada polri”.⁵⁰

Indonesia sendiri, kemerdekaan berpendapat merupakan perwujudan dari sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁵¹ Ditambah lagi, Undang-Undang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Pasal 9 Ayat (1) yang membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

b. Sejarah Praktik Demonstrasi di Indonesia

Sejak zaman pemerintahan Bung Karno sebenarnya demonstrasi sudah terlaksana, tetapi begitu tidak terlihat. Pada tanggal 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa aksi demonstrasi yang ditunggangi agenda

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 10 Ayat 1.

⁵¹ Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum* (Jakarta: Restu Agung, 2006) cet. 1 h. 36.

"kudeta" terhadap kekuasaan Bung Karno. Hingga kekuasaan masa Presiden Suharto ini dianggap sangat absolut. Hal ini bisa dikatakan melemahnya UUD 1945 dikarenakan saat pemilihan presiden dengan cara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi pada masa pemerintahan kedua beliau (1959-1966). Kelemahan tersebut sangat dimanfaatkan oleh Suharto, yang mana beliau bisa menjabat hingga selama 30 tahun. Hingga pada tahun 1990-an, pada masa akan berakhirnya kepemimpinan beliau, dengan sistem kekuasaannya yang tidak terbatas, beliau dikenal dengan presiden yang diktator. Banyak yang menyangka bahwa beliau sudah lagi bukan seorang presiden melainkan seorang raja.

Kalangan masyarakat maupun mahasiswa sudah tidak ada lagi yang percaya dengan kepemimpinan Soeharto, dikarenakan mereka sudah menganggap bahwa pemerintahan beliau telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya praktek KKN tersebut banyak elemen dari masyarakat maupun mahasiswa yang mendesak beliau untuk turun dari jabatannya dikarenakan sudah banyak meresahkan rakyat yang telah berlangsung kekuasaannya selama 30 tahun. Peristiwa pendesakan tersebut bermula dari awal krisis moneter yang berlangsung di Thailand pada awal Juli tahun 1997.⁵²

Krisis ekonomi terus meningkat, dan semakin meningkat. Dengan demikian suatu tuntutan reformasi mulai tampak di mana-mana. Dan

⁵² Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h.2.

terbukti dengan jelas bahwa rezim kekuasaan ini tidak mampu untuk mereformasikan diri, sehingga membuat mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa dimana-mana. Demonstrasi semula dilakukan di kampus-kampus oleh para mahasiswa. Dan kemudian para mahasiswa ada yang bergerak menuju wilayah gedung DPR untuk menyuarakan keluhan kesah dari masyarakat. Hari terus berjalan hingga memasuki pada bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa semakin meningkat yang berpartisipasi dalam pergerakan unjuk rasa hingga ratusan orang. Semakin kuatnya pergerakan demonstrasi ini didukung juga oleh alumni dan para dosen yang prihatin akan peristiwa kekacauan negara ini. Adapaun para pengaman negara seperti ABRI pun membiarkan adanya aksi yang dilakukan di kampus-kampus. Dan pada bulan Mei para aksi demonstrasi mulai bergerak ke jalan-jalan di kota besar. Dan peristiwa tersebut mengakibatkan kerusuhan besar yang terjadi di wilayah medan.

Pada tanggal 12 Mei para mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Universitas Trisakti Jakarta terjadi kerusuhan yang sangat besar, dimana penembak jitu ABRI dikerahkan untuk mengamankan para demonstran dan terjadi penembakan empat orang mahasiswa demonstran. Peristiwa tersebut membuat beberapa tokoh penting dalam militer seperti jenderal Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwasanya pemerintahan Soeharto tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Diwaktu berikutnya pada tanggal 13 Mei setelah melakukan penguburan

empat mahasiswa yang terkait penembakan tersebut, ribuan mahasiswa Trisakti menggelar aksi bergabung dikampus. Ribuan massa pun mulai berkumpul di lingkungan Trisakti. Saat para massa akan melakukan gabungan, pencegahan pun dilakukan oleh aparat keamanan yang mengakibatkan kerusuhan yang tidak diinginkan terjadi, para demonstran mengamuk dan melakukan aksi pelemparan hingga perusakan.

Sejak terjadinya peristiwa tersebut, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi mana-mana dan di kota-kota besar. Dimana setiap aksi demonstrasi tersebut diiringi dengan perusakan-perusakan fasilitas negara maupun daerah, guna meminta Soeharto untuk bertanggung jawab dan segera mundur dari masa pemerintahannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi puncak terbesar aksi demonstrasi tersebut, dan saat itu pula presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia karena disebabkan banyaknya desakan baik dari DPR, MPR, dan para aksi demonstrasi yang sudah tidak dapat terbendung lagi banyaknya. Dalam peristiwa tersebut, tidak lepas dari peran para mahasiswa aktivis dan rakyat dalam menyampaikan pendapat di depan umum, yang mana sejalan dengan sifatnya yang responsive yang tidak hanya diam melihat keadaan sosial yang demikian saja. Mereka selalu bersikap kritis. Sikap kritis yang meliputi segala hal, bahkan hingga tanpa kreativitas untuk memecahkan masalah, yang selanjutnya menimbulkan sikap anti yang lebih besar daripada

kemampuan positif untuk memberikan alternatif, atau kemampuan untuk bersikap pro terhadap sesuatu dalam hal gerakan protes mahasiswa.

c. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum

Gagasan pemerintah yang mengatur tentang unjuk rasa sebenarnya sudah difikirkan sejak masa orde Baru, yakni saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Bidang Polkam, Rabu 4 Mei 1994. Namun RUU tersebut tidak kunjung terealisasi, hingga pada suatu ketika krisis ekonomi yang menyerang kawasan Asia termasuk Indonesia. Pada waktu tersebut, terjadilah suatu peristiwa unjuk rasa yang besar-besaran yang dimana mahasiswa menuntut adanya Sidang Istimewa MPR dan turunnya Soeharto, hingga mengakibatkan kekacauan di Jakarta. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya penembakan empat mahasiswa Trisakti (Jakarta), 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut merupakan titik awal dan seakan menjadi martir terjadinya kerusuhan yang lebih besar, 13-15 Mei 1998.⁵³

Rentetan dari peristiwa kelam tersebutlah yang memunculkan sebuah spekulasi adanya kondisi keadaan genting yang memaksa untuk melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ PERPU Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Menteri Kehakiman Muladi pada saat di Bina Graha

⁵³ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Unang-undang unjukrasa* (Jakarta: Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), 1999), hal. 1.

menjelaskan bahwasanya terbitnya PERPU itu konstitusional karena didasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut; Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."⁵⁴

Pernyataan bahaya presiden, pasca amandemen saat ini terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana beberapa syarat serta akibat dari keadaan darurat telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Pada tanggal 24 Juli 1998, PERPU dengan Nomor 2 Tahun 1998 tersebut kemudian ditandatangani Presiden BJ Habibie. Pada tanggal 11 September 1998, Pemerintah menyampaikan Perpu No. 2 Tahun 1998 secara resmi dalam rapat paripurna DPR. Pada tanggal 15 September 1998, Menteri Kehakiman Muladi mengatakan pemerintah tidak berkeberatan mencabut ketentuan mengenai sensor pers. Pada tanggal 29 September 1998, Pemerintah diwakili Menhankam Jenderal TNI Wiranto di DPR menyatakan, menarik PERPU Nomor 2 Tahun 1998 dan segera menyampaikan RUU tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pada tanggal 2 Oktober 1998, Pemerintah menyampaikan RUU dan menyampaikan keterangan kepada DPR. Pada tanggal 6

⁵⁴ Sekjen MPR RI, *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 1.

Oktober 1998, RUU langsung dibahas di Komisi I DPR RI. Empat fraksi sepakat meneruskan pembahasan RUU dengan Prosedur singkat. Pada tanggal 22 Oktober 1998, DPR menyetujui RUU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum. Pada tanggal 28 Oktober 1998, pemerintah undangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang terdiri dari 7 bab dan 20 pasal dimana Undang-Undang tersebut terdaftar dilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789 dan langsung dinyatakan berlaku.⁵⁵

B. Tinjauan Pustaka

Penulis memahami bahwa adanya literatur yang membahas mengenai demonstrasi dan tentunya mempunyai redaksi dan substansi masing-masing, baik dalam lingkup Universitas Islam maupun Universitas lainnya yang ada di Indonesia ini. Tinjauan pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, agar terhindar dari plagiasi, dan penulis menemukan beberapa jurnal dan skripsi lain yang membahas mengenai demonstrasi, seperti :

Pertama dalam jurnal Muhammad Aminullah, Sekolah Tinggi Ilmu Alquran Bima, El-Hikam, Jurnal pendidikan dan Kajian Keislaman tentang : *Demonstrasi Dalam Persepektif Hadis*. Disimpulkan dalam jurnal tersebut Dalam penjelasan jurnal tersebut tidak terdapat sedikitpun isyarat untuk melakukan demonstrasi dengan cara anarkis. Hadis-hadis tersebut menekankan dalam mengoreksi,

⁵⁵Budiman Tanuredjo, *ibid*, h. 73.

mengkritik dan menasehati penguasa harus selalu mengedepankan sikap yang santun dan baik. Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama perihal boleh atau tidaknya demonstrasi yang dikaitkan dengan metode *amr ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa, secara tertutup ataupun terbuka. Dalam hal ini, menurut penulis dalam rangka mengkoreksi, mengkritik dan menasehati penguasa sah-sah saja menggunakan dua metode tersebut (tertutup dan terbuka), namun kedua metode tersebut bisa dijadikan tahap-tahap yang harus dilalui. Pertama bisa dilakukan koreksi, kritik dan nasehat dengan cara tertutup, jika langkah pertama ini tidak berhasil baru dilakukan dengan langkah kedua dengan cara terbuka melalui demonstrasi.

Dengan demikian kedua cara tersebut bisa sama-sama dipakai tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Melihat realitas sekarang, kedua metode tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sebagai cara untuk melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*. Namun yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai aksi-aksi tersebut menjadi alat kepentingan elit politik, sehingga kebenaran yang ingin disampaikan menjadi malapetaka bagi rakyat dan kehidupan sosial. Oleh sebab itu para demonstran dituntut untuk tetap kritis tentang hal-hal yang sekiranya tidak sejalan dengan tujuan demonstrasi tersebut.⁵⁶

Kedua dalam skripsi Abdussalam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang membahas tentang : Persepsi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam negeri

⁵⁶ Demonstrasi dalam Perspektif Hadits. *Ibid*, h. 376.

Suska Riau Terhadap Demonstrasi Dalam menyampaikan Pendapat Menurut Persepektif Fiqh Siyasah, tahun 2009. Didalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa :

1. Persepsi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi adalah bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif ditempuh rakyat untuk menyampaikan pendapat berupa kritikan, saran dll. Terhadap pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bertujuan untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi mungkar*.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa UIN Suska Riau terhadap demonstrasi adalah:
 - a. Bahwa demonstrasi dilatar belakangi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
 - b. Bahwa kurangnya peminat mahasiswa UIN Suska Riau disebabkan karena mereka tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang diangkat para demonstran serta tujuan dari penyelesaian masalah tersebut.
 - c. Bahwa keikut sertaan mereka lebih didasari oleh sifat memberikan dukungan solidaritas untuk rakyat.
3. Demontrasi dasar hukumnya adalah mubah (boleh), dan hukum demonstrasi tersbut bisa berubah dengan melihat kondisi yang terjadi. Jika demonstrasi untuk memperjuangkan hak yang dirampas sekaligus menegakkan *amr ma'ruf nahi mungkar* dan tergolong Demonstrasi Aman, maka hukumnya boleh dan bahkan wajib. Tetapi jika demonstrasi bertujuan untuk anarkisme

merusak fasilitas sosial dan tergolong kepada demonstrasi anarkis, maka hukumnya adalah haram.⁵⁷

Dari hasil tinjauan Pustaka di atas ada perbedaan dengan kajian yang akan penulis ingin bahas, dalam tinjauan pustaka yang kedua hanya membahas tentang demonstrasi menurut persepektif hadis dan tinjauan pustaka yang ketiga membahas tentang demonstrasi menurut para mahasiswa uin suka riau yang ada di kepulauan riau, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dan adapun persamaan dari tinjauan pustaka yang pertama dan kedua dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang demonstrasi dan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas tentang “Analisis *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan umum Terhadap Aksi Demonstrasi”.

⁵⁷ Abdussalam, *ibid*, h. 63.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: HAMZAH, 2015.
- Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Jakarta: Restu Agung, 2006, cet ke-I.
- Abu Dawud Sulaiman bin Ats'as as-Sajastani, *Sunan abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996, Jus III.
- Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Abu A'la Almaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, penerjemah Bambang Iriana Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad bin Hambal abi Abdillah as-Syaibani, *Al-Musnad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Juz IX, .No24036.
- Ali, Novel, *Peradaban Kominikasi Politik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Alquran, *Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, AT-TAYYIB: Cipta Bagus Segara.
- Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialaog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), cet II.
- Aqiel Sirajd, Said, *Islam, Demonstrasi dan negara*, <http://www.Kompas.com/kompas-cetak/0411/01/opini/1325143.htm>, diakses 18 Oktober 2019.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-fikri, 1409H/1989M, juz VI.
- Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet ke-IV.
- Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Unangg-undang unjuk Rasa*, Jakarta: Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), 1999.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet ke-IV.
- Erwin, Rudi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Frista Artmanda W, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media.
- Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin*, (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/1264 M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam.
- Mahmud, Musthafa, “*Thahan, Pemikiran Moderat Hasan Al-Bana*”, terj. Akmal Burhanuddin, Bandung: Penerbit Harkatuna, 2007.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Politik*, Jakarta: DU CENTER cet ke-4.
- Sekjen MPR RI, *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012 cet Ke-14.
- Solihin, Bunyana, *Kaidah hukum Islam didalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kreasi total media, 2016, cet.1.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016 cet ke-23.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, Jakarta: Robbani Press, 1991, cet 1, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid.

Peraturan Perundang-Undangan

- Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor: SE 15 Tahun 2017, Tentang Larangan Penyampaian Pendapat di Depan Umum Pada Objek-Objek Vital Transportasi Nasional.

Naskah Amandemen UUD 1945, MPR RI Rancangan Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945, BAB X A Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E Ayat (2 dan 3).

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 8 Ayat (1) Huruf c dan d.

Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor : Protap/1/X/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum.

Jurnal:

Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, “*Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstrasi di Indonesi*” *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November 2017.

Fuad Habibi Siregar, *et all*, *Vandalisme dan Tindakan Kekerasan Gerakan Mahasiswa (studi kasus: Himpunan Mahasiswa Islam)*, (Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol 5, No 2 Desember 2019).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Larangan Penyampaian pendapat Pada Objek Vital Transportasi Nasional*. (on-line), tersedia di: dephub.go.id/post/read/larangan-penyampaian-pendapat-pada-obyek-vital-transportasi-nasional, (1 Januari 2021).

Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*”, Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2, JuliDesember 2014.

Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat*, Gorontalo: Jurnal.

H Haryanto, *Metode Demonstrasi*, Skripsi yang dibuat tentang Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011, (14 Juli 2020).

Vera Mashinta, *People Power (Kekuatan Rakyat) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Bengkulu 2020), h. 51. (26 Desember 2020).

Sumber Internet:

Alasan Demonstrasi Pelajar, Antara Rusuh dengan Aspirasi, (On-line), tersedia di: TEMPO.CO. Jakarta, 2019, (30 Desember 2020).

BBC News, *Demonstrasi Warnai Kenaikan Harga BBM*, (On-line), diakses di: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/06/120621_bbm_demonstrasi, (26 Desember 2020).

Detiknews, *Seputar Demo Mahasiswa yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*, (On-line), diakses di: <http://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>, (26 Desember 2020)

Dosen Sosiologi, *Pengertian Demonstrasi, Sebab dan Akibatnya*, (On-line), diakses di: <http://dosensosiologi.com/pengertian-demonstrasi/>, (26 Desember 2020).

Fitri Novia Heriani, *Apakah Polisi berwenang Memukul Demontran*, (On-line), tersedia di: Hukum Online.com, (27 Desember 2020).

Macam-Macam Demonstrasi, (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Engineering, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember), (on-line), tersedia di: <http://immengineering.wordpress.com/2012/05/21/macam-macam-demonstrasi/>, (26 Desember 2020)

Yayat Supriyatna, *Membangkitkan Daya Nalar Peserta Didik*, (On-line), tersedia di: Artikelkemenag, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/membangkitkan-daya-nalar-peserta-didik>, (30 Desember 2020)

-----, <http://m.detik.com/news/berita/d-4728216/5-fakta-hari-ini-di-jakarta-yang-berakhir-ricuh.htm>. Diakses 20 Oktober 2019.

-----, Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum (on-line), tersedia di: http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98_tth_kemerdekaan_menyampaikan_pendapat_dimuka_umum.pdf.htm. Diakses 16 Oktober 2019.